



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SAPTOWO

NIK : 3175092911710005

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sub Unit Kerja : KANTOR KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN
MAKASAR

Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN

Jenis Laporan : Periodik - 2024

Tanggal Kirim : 2 Februari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SIGIT PRIYONO
NIK : 3172042606850022
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Sub Unit Kerja : KANTOR KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN
MAKASAR
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membatas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FAISAL RIZAL
NIK : 3175070712730012
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Unit Kerja : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Sub Unit Kerja : KANTOR KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN
MAKASAR
Jabatan : LURAH
Jenis Laporan : Periodik - 2024
Tanggal Kirim : 6 Maret 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANG SIDIK PRAMONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 873656

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.787.805.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m²/50 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 299.680.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/100 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 923.125.000
3. Tanah Seluas 299 m² di MAGETAN, WARISAN Rp. 260.000.000
4. Tanah Seluas 1285 m² di MAGETAN, WARISAN Rp. 305.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **472.600.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ/JEEP S.C.HDPI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX150E CKD/SPD.MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 14.800.000
3. MOTOR, YAMAHA D1A02N1BM1 AT/SPD. MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
4. MOTOR, HONDA FIC02N28L0 AT/SPD. MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.800.000
5. MOTOR, YAMAHA B6H-L AT SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **11.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **106.514.223**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **20.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.397.919.223
III. HUTANG	Rp.	816.330.061
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.581.589.162

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.